

PROBLEMATIKA TATA KELOLA AIR DI UMBUL JUMPRIT DESA TEGALREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024

Shilvia Maflakhah¹, Rina Martini², Supratiwi³
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id
email: shilvia291@gmail.com

ABSTRAK

Air bersih merupakan bagian yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan manusia. Melimpahnya sumberdaya air di Indonesia dan pentingnya peran air bersih bagi manusia membutuhkan tata kelola air bersih yang baik dan terjamin keberlangsungannya. Akan tetapi, masih terdapat banyak daerah yang memiliki tata kelola air bersih yang buruk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika tata kelola air dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasinya dengan menggunakan teori *water governance* OECD (OECD, 2015) dan *institutional assessment* (Lusthaus, *et al.*, 1995:10) untuk melihat bagaimana berjalannya kelompok pengelola air bersih. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari termasuk ke dalam kategori tata kelola air bersih buruk jika diukur berdasarkan teori *water governance* OECD. Karena prinsip-prinsip *water governance* masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam pengelolaan air di 3 desa tersebut yang menimbulkan problematika seperti akses air bersih yang belum tercukupi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, kurang tersistemnya kelompok pengelola, kurangnya regulasi dan peraturan yang legal mengatur mengenai kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat. Disamping problematika tata kelola yang terjadi, juga telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya diantaranya: penambahan sumber air bersih, peningkatan infrastruktur, dan dibentuknya regulasi yang digunakan sebagai pedoman berjalannya organisasi pengelola. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih belum optimal dalam mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan-perbaikan tata kelola air bersih terutama yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat baik berupa pelatihan SDM, bantuan peningkatan infrastruktur, sampai dengan dibuatnya regulasi khusus untuk kelompok swadaya masyarakat agar kelompok pengelola air bersih memiliki pedoman untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan air bersih di masing-masing desa.

Kata Kunci: *Water Governance, Air Bersih, Umbul Jumprit*

ABSTRACT

Clean water is a very important part of human life. The abundance of water resources in Indonesia and the important role of clean water for humans requires good clean water governance and guaranteed sustainability. However, there are still many areas that have poor clean water governance in Indonesia. This research aims to analyze the problems of water governance and the solutions that have been carried out in overcoming them by using the OECD water governance theory (OECD, 2015) and institutional assessment (Lusthaus, et al., 1995: 10) to see how the water management group runs. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observations, and literature studies. The results of this study show that clean water management in Tegalrejo Village, Katekan Village, and Mangunsari Village falls into the category of poor clean water governance when measured based on the OECD water governance theory. Because the principles of water governance are still not fully fulfilled in water management in these 3 villages, which causes problems such as insufficient access to clean water, limited human resources and infrastructure, lack of systemized management groups, lack of legal regulations and regulations governing community self-help clean water management groups. In addition to the governance problems that occur, efforts have also been made to overcome them, including: adding clean water sources, improving infrastructure, and establishing regulations that are used as guidelines for the running of management organizations. However, these efforts are still not optimal in overcoming the existing problems. Therefore, there is a need for improvements in clean water governance, especially those carried out by self-help groups in the form of human resource training, infrastructure improvement assistance, and the creation of special regulations for self-help groups so that clean water management groups have guidelines to carry out their roles and responsibilities in managing clean water in each village.

Keywords: *Water Governance, Clean Water, Umbul Jumprit*

PENDAHULUAN

Terbentuknya pemerintah di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada hakikatnya sebuah keniscayaan, karena kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks sehingga membutuhkan sebuah organisasi tunggal, resmi dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan masyarakat tersebut. Pemerintah sendiri diartikan sebagai segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara Ndaraha (1997) dalam (Labolo, 2007), salah satunya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan yang terwujud dengan tersedianya akses air bersih dan sanitasi yang layak.

Jaminan akses air bersih yang sehat, layak dan terjangkau telah termuat di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya pada Pasal 6 UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air “Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan

bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alamnya, salah satunya ketersediaan sumber daya air yang menurut hasil survei sumber daya air terbarukan dunia yang dilakukan oleh Ian Tiseo pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-8 dengan estimasi ketersediaan sumber daya air terbarukan sebesar 2,019 milyar³ (Tiseo, 2022). Akan tetapi, terdapat berbagai permasalahan kekurangan air mengingat kebutuhan air semakin meningkat setiap tahunnya, misalnya Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 154 juta atau sekitar 56% dari keseluruhan penduduk Indonesia, memiliki kebutuhan air sebesar 59% dari total kebutuhan air nasional.

Selain itu, kondisi ketersediaan air bersih di setiap daerah memiliki tantangan-tantangan tersendiri, seperti kemudahan akses dan kualitas air yang dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap daerah yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda, serta tata kelola air bersih yang buruk juga menjadi problematika yang mempengaruhi berjalannya tata kelola air di Indonesia.

Melemahnya tata kelola air bersih disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara pemangku kepentingan

seperti yang terjadi dalam pengelolaan air bersih di Desa Suntenjaya (Rifandini, 2022). Buruknya tata kelola air bersih juga terjadi di Desa Ampelan, Kabupaten Bondowoso yang sampai menimbulkan konflik dan pertukaran-pertukaran diantara Ulu-ulu (Pamong Desa yang khusus mengerjakan bidang pengairan) (Prastika, 2020). Selain itu, ketidakjelasan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih menjadi permasalahan lainnya dalam pengelolaan air bersih di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta (Harjanta, 2023).

Problematika tata kelola air juga terjadi di Umbul Jumprit yang terletak di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung seperti: tidak adanya peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan air di Umbul Jumprit yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat, keluhan masyarakat atas tata kelola air buruk yang menyebabkan akses air bersih terhambat, sampai dengan adanya ketidakadilan dan konflik dalam mengakses air bersih.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana problematika tata kelola air yang terjadi di Umbul Jumprit dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari teori *water governance* OECD, serta dimensi *the external environment* dari teori *institutional assessment* milik (Lusthaus, et al., 1995:10) untuk digunakan dalam

melihat bagaimana pengelolaan air bersih Umbul Jumprit yang dilakukan oleh kelompok pengelola swadaya masyarakat di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara lebih komprehensif dan saran untuk bisa digunakan dalam meningkatkan tata kelola air di Umbul Jumprit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif untuk menjelaskan atau menganalisis fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dengan melakukan interpretasi pada data yang telah diperoleh dari 3 desa pengguna air bersih Umbul Jumprit di mana penelitian ini dilaksanakan, yaitu Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari.

Sedangkan untuk informannya meliputi Kepala Perum Perhutani BKPH Kedu Utara, Kepala PDAM Tirta Agung Temanggung, Kepala Desa Tegalrejo, Kepala Desa Katekan, Kepala Desa Mangunsari, kelompok pengelola air bersih dari masing-masing desa, dan masyarakat pengguna air bersih Umbul Jumprit. Dari informan-informan tersebut data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan proses analisis data

melalui reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Tata Kelola Air di Umbul Jumprit

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan adaptasi dari teori *water governance* OECD yang didukung dimensi kondisi lingkungan eksternal teori *institutional assessment* Charles Anderson Lusthaus diperoleh bahwa tata kelola air di Umbul Jumprit mengalami berbagai problematika sebagai berikut:

a. Pada dimensi pertama yaitu dimensi efektivitas problematika tata kelola air yang terjadi adalah terdapat hambatan dalam akses air bersih yang disebabkan karena adanya ketidakjelasan alokasi peran dan tanggungjawab pengelola, serta keterbatasan kemampuan pengelola yang menyebabkan dalam mengatasi permasalahan mati air cukup tidak efektif dan memakan waktu lama. Problematika tersebut semakin signifikan pengaruhnya dalam tata kelola air bersih di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari yang memanfaatkan air dari Umbul Jumprit karena

belum terdapat kebijakan koheren yang membuka peluang kerja sama berbagai bidang terutama bidang atau lembaga yang memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada anggota dalam pengelolaan air bersih.

- b. Pada dimensi efisiensi problematika tata kelola air yang terjadi adalah tidak adanya peraturan legal yang mengatur secara jelas bagaimana seharusnya kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat berjalan, serta memuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pengguna air bersih. Karena hal tersebutlah menyebabkan kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal dan berdampak pula pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur. Serta menyebabkan konflik perebutan akses air bersih karena tidak ada peraturan yang legal agar antar pengelola dan pengguna di masing-masing wilayahnya menggunakan air bersih yang menjadi haknya tanpa mengambil yang menjadi hak wilayah lainnya.
- c. Berdasarkan pada analisis dimensi kepercayaan dan keterlibatan tidak ada problematika yang berarti,

karena terbangun hubungan yang saling mempercayai diantara pengelola dan masyarakat pengguna air bersih, karena pengelolaan air bersih yang menjamin transparansi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

B. Upaya-upaya yang Telah Dilakukan dalam Mengatasi Problematika Tata Kelola Air di Umbul Jumprit

Dari berbagai problematika yang terjadi dalam pengelolaan air bersih di Umbul Jumprit sudah dilakukan berbagai solusi baik oleh pengelola ataupun pemerintah desa setempat untuk mengatasi problematika tersebut. Akan tetapi, upaya-upaya yang telah diimplementasikan belum mengatasi keseluruhan dari problematika yang ada, artinya masih banyak masalah pengelolaan air lainnya yang sampai sekarang belum memiliki penyelesaian yang tepat. Berikut penjabaran dari solusi-solusi yang sudah dilaksanakan dalam mengatasi problematika tata kelola air di Umbul Jumprit.

a. Penambahan Sumber Air Bersih

Desa Tegalrejo merupakan desa dimana Umbul Jumprit yang digunakan sebagai sumber air bersih berada. Meskipun demikian, Desa Tegalrejo mengalami permasalahan kurangnya

pemenuhan air bersih untuk 3 RT di Dusun Jumprit yang letaknya berada lebih tinggi dari Umbul Jumprit. Pada awalnya Pemerintah Desa berusaha mengatasi dengan cara memasang pompa yang nantinya air akan diangkut ke bak penampungan yang letaknya lebih dekat dengan daerah yang kesulitan mengakses air. Akan tetapi solusi tersebut kurang efektif karena tekanan pompa yang kurang besar sehingga air tidak bisa naik. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Tegalrejo mencari solusi lain dengan bekerjasama dengan Desa Canggal yang letaknya berada lebih tinggi dari Dusun Jumprit untuk mengambil air dari salah satu sumber mata air yang ada di Dusun Jumprit

b. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses air bersih demi terjaminnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat luas. Meningkatkan infrastruktur menjadi solusi yang tidak mudah dilakukan karena dalam pelaksanaannya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan dana yang diperoleh

dari iuran pengguna air bersih tidak cukup menutupi anggaran dana yang akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur air bersih. Oleh karena itu, bantuan dana dari pemerintah menjadi angin segar bagi pengelola air bersih di setiap desa. Dari 3 desa tempat penulis melakukan penelitian, Desa Tegalrejo dan Desa Mangunsari menjadi desa yang menerima bantuan dana aspirasi untuk meningkatkan pengelolaan air bersih.

c. Adanya Regulasi yang Jelas

Regulasi merupakan cara untuk memberikan kejelasan peraturan dan kerangka kerja dalam suatu organisasi. Dalam hal pengelolaan air bersih regulasi sangat dibutuhkan oleh kelompok atau organisasi pengelola untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tata kelola air bersih di suatu tempat. Problematika tata kelola air di 3 desa yang menjadi tempat penelitian penulis secara garis besar didominasi oleh permasalahan tidak dijalankannya pengelolaan air bersih yang semestinya karena tidak terdapat regulasi yang mengatur. Berbeda dengan pengelolaan air bersih di Desa Tegalrejo dan Desa Katekan,

Desa Mangunsari telah memiliki regulasi yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa yang secara umum mengatur mengenai pembentukan organisasi sampai dengan pengelolaan air bersih di Desa Mangunsari. Surat Keputusan tersebut menjadi pedoman yang memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pengelolaan air di Desa Mangunsari.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data penelitian mengenai problematika tata kelola air di Umbul Jumprit Kecamatan Ngadirejo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata kelola air di Umbul Jumprit terkhususny di Desa Tegalrejo, Desa Katekan, dan Desa Mangunsari memiliki beberapa problematika tata kelola air diantaranya: keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, kurang tersistemnya kelompok pengelola sehingga mempengaruhi jalannya kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat, kurangnya regulai dan peraturan legal yang mengatur mengenai kelompok pengelola air bersih swadaya masyarakat, serta konflik

- antar desa yang memperebutkan akses air bersih.
2. Dari banyaknya problematika yang dihadapi dalam pengelolaan air bersih di Umbul Jumprit telah dilakukan beberapa solusi penyelesaian masalah seperti penambahan sumber air bersih, peningkatan infrastruktur dan adanya regulasi yang jelas. Akan tetapi, solusi-solusi penyelesaian masalah yang telah diimplementasikan tersebut belum sepenuhnya mengatasi problematika tata kelola air bersih yang terjadi seperti di Desa Katekan yang sampai saat ini masih kesulitan memperoleh akses air bersih terutama di musim kemarau meskipun telah dilakukan upaya penambahan sumber air bersih selain dari Umbul Jumprit. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut terutama peningkatan kerjasama lintas sektoral, serta inovasi dalam pengelolaan air bersih di Kecamatan Ngadirejo.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan air bersih di Umbul Jumprit, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Temanggung diharapkan membuat regulasi atau kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan air bersih yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat mengingat mayoritas pengelolaan air bersih di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh lembaga non PDAM. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung juga diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengelolaan air yang dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat melalui program-program yang dapat meningkatkan kemampuan pengelola dan meningkatkan infrastruktur air bersih untuk memperluas akses air bersih, serta kebutuhan air bersih yang terjamin keberlanjutannya.
2. Pemerintah Desa diharapkan memberikan pendampingan dan memfasilitasi setiap kelompok pengelola baik dalam memperoleh peraturan yang legal secara hukum dalam mengatur pembentukan kelompok pengelola sampai dengan sistem pelaksanaan pengelolaan air bersih. Selain itu, pemerintah desa diharapkan berperan memfasilitasi kelompok

pengelola dalam menjalin kerjasama dengan pihak atau sektor lain dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola dan layanan air bersih yang berkualitas.

3. Pengelola air bersih di setiap desa diharapkan dapat lebih meningkatkan tanggungjawabnya dalam melaksanakan perannya sebagai pengelola, serta memahami peran atau *jobdesk* yang telah dibebankan.
4. Bagi masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pengelolaan air bersih terutama keterlibatannya dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan tata kelola air bersih, serta berperan aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan air bersih di desanya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (. (2017, Mei 8). *Wisata Temanggung-Jauh dari Keriuhan Kota, Air Umbul Jumprit Selalu Dipakai untuk Air Suci Waisak*. Retrieved April 2, 2024, from Tribuntravel.com:
<https://travel.tribunnews.com/2017/05/08/wisata-temanggung-jauh-dari-keriuhan-kota-air-umbul-jumprit-selalu-dipakai-untuk-air-suci-waisak>
- Araral, E. &. (2013). Water Governance 2.0: A Review and Second Generation Research Agenda. *Springerlink*, 3945-3957.
- Azansyah. (2013). Peran Kelembagaan dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan di Indonesia, dan Membangun Lembaga yang Efektif. *EKBISI, Vol. VII, No.2*, 262-279.
- Biswas, A. K. (2010). Future Water Governance: Problems and Prespectives. *International Journal of Water Resources*, 129-139.
- BPS Kabupaten Temanggung. (2019, Juni 21). *Luas Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Laut (Hektar)*. Retrieved Desember 12, 2023, from BPS Kabupaten Temanggung:
<https://temanggungkab.bps.go.id/>
- Creswell, J. W. (2015). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative (5th Ed.)*. Hoboken: Pearson Education, Inc.
- Gunawan, I. (2013:209-212). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harjanta, S. (2023, Oktober 10). *Darurat Kekeringan dan Tata Kelola Air Kolaboratif*. Retrieved Januari 18, 2024, from detiknews:
<https://news.detik.com/kolom/d-6973304/darurat-kekeringan-dan-tata-kelola-air-kolaboratif>
- Lusthaus, C., Anderson, G., & Murphy, E. (1995). *Institutional Assessment: A Framework for Strengthening Organizational Capacity for IDRC's Research Partners*. Canada: International Development Research Centre.
- OECD. (2015). OECD Principles on Water Governance. *OECD* (pp. 1-23). Paris: OECD.
- Prastika, Y. d. (2020). Pertukaran Sosial: Studi Tentang Tata Kelola Air di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Entitas Sosiologi*, 9(2), 152-166.

- Pemerintah Kabupaten Temanggung. (2021, 12 20). *Sekilas Temanggung*. Retrieved Desember 7, 2023, from TEMANGGUNGKAB.GO.ID: <http://www.temanggungkab.go.id/>
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. (2023, Agustus 7). Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2037. *Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2037*. Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Perum Perhutani. (2023, Maret 1). Retrieved April 2, 2024, from Perhutani.co.id: <https://www.perhutani.co.id>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Rifandini, R. (2022). Kebijakan Inovatif Tata Kelola Air Bersih Desa melalui Dinamika Tipologi Kelembagaan. *MATRA*
- PEMBARUAN: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(2) , 83-94.
- Schotter, A. (1981:82). *The Economic Theory of Social Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tiseo, I. (2022). *Global Renewable Water Resources 2018, by Select Country*. Jerman: Statista.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: A UNDP Policy Documents.
- UN-Water. (2014). A Post-2015 Global Goal for Water: Synthesis of key findings and recommendations from UN-Water. *UN-Water*, 1-41.
- Woods, N. (2000). The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves. *World Development Vol. 28, No. 5*, 823-841.
- Yusuf, A. M. (2014:407-409). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Ed.1)*. Jakarta: Kencana.